

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedelapan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. (2015). *Public Policy Making: An Introduction*. Eighth Edition. Boston: Cengage Learning.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2022). *Kecamatan Sukakarya Dalam Angka 2022*. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020*. Jakarta: BPS.
- Cahyono, Heru, *et.al.* (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan*. Jakarta: LIPI Press.
- Dunn, Wiliam N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada Universtiy Press.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- KOMPAK. (2017). *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D., Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. (2018). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

B. Jurnal Ilmiah

- Arfiansyah, Mufti Arief. *Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Hartono, R. S., & Nuraini, S. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Analysis of Effectiveness and Financial Independence of Bekasi Regency)*. Increasing Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance, 19-38.

- Kunta, H. A., & Hartono, R. S. (2021). *Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Pelayanan Prima di Kabupaten Bekasi*. Governance, 9(2), 1-21.
- Kuswandi, A., Al Rasyid, M. H., & Nuraini, S. (2021). *Kinerja Daerah Otonom Baru di Indonesia: Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran*. Increasing Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance, 1-18.
- Kuswandi, A., Kurniasih, D., & Karniawati, N. (2018). *Pelatihan e-government bagi aparat pemerintah desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang*. Jurnal Abdimas Mandiri, 2(1).
- Kuswandi, A., Purwatih, A. R., & Nuraini, S. (2018). *Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Governance, 8(1), 82-101.
- Lalira, Dianti, Amran T. Nanoko & Ita Pingkan F. Rorong. *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 18 No. 04 Tahun 2018.
- Maryuni, Sri. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak*. Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015.
- Mimbar, L. *Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPPD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Transformasi P2M IAIN Mataram, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Nuraini, S. (2010). *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*. Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1-13.
- Nuraini, S. (2019). *Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan di Kabupaten Bekasi*. Journal of Public Administration and Local Governance, 3(2), 130-142.
- Ras, Atma. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. SOCIUS. Volume XIV, Oktober-Desember 2013.
- Sonda, Juliana, Burhanuddin Kiyai & Helly Kolondam. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*. Jurnal Administrasi Publik. Volume IV No. 062.
- Sopiansyah, Tonny, Achmad Djumlani & Heryono Susilo Utomo. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di Kecamatan*

Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.3, Juli-September 2016.

Sunu, Made Krisna Kalpika, dkk. *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 8.8. 2019.

Wijaya, Mahendra. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Journal of Rural and Development Volume 1 No. 1 Februari 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Keputusan Dirjen Linjamsos Kemensos RI Nomor: 02/3/OT.02.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

D. Internet

<https://economy.okezone.com/read/2021/01/15/320/2345118/sri-mulyani-sebut-dana-desa-turunkan-angka-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

<https://republika.co.id/berita/q472tk370/dana-desa-belum-efektif-kurangi-kemiskinan-di-desa>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

<https://sid.kemendesa.go.id>. Diakses pada 1 Februari 2021.

<https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 23 Januari 2021.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2020.